

ABSTRACT

Responsiveness is the government's ability to identify community needs, prioritize services, and develop programs tailored to the problems faced by the community. One issue requiring government attention is juvenile delinquency in the form of motorcycle gangs, which can disrupt public order and security. Asahan Regency continues to face the problem of motorcycle gangs, requiring responsive handling from the local government. This study aims to determine the responsiveness of the Asahan Regency Government in addressing juvenile delinquency in motorcycle gangs. This study used qualitative methods with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with the Asahan Police, the Asahan Regency Public Order Agency (Satpol PP), the Asahan Regency Social Service, the Asahan Regency Education Service, the Asahan Regency Regional People's Representative Council (DPRD), former motorcycle gang members, and parents of former motorcycle gang members. The results indicate that the Asahan Regency Government's responsiveness in addressing juvenile delinquency in motorcycle gangs is quite responsive. This is evident in routine patrols, raids, school outreach, youth development, and inter-agency coordination in efforts to prevent and address motorcycle gangs. Furthermore, the Asahan Regency Government is also supported by Asahan Regent Regulation No. 48 of 2022 and Asahan Regent Regulation No. 36 of 2024 as the basis for implementing juvenile delinquency management and public order management. It is recommended that synergy between the government, families, schools, and the community continue to be strengthened through ongoing coordination, education, and youth development. This will allow for more effective handling of juvenile delinquency and motorcycle gangs in Asahan Regency and create a safe, orderly, and conducive environment for the development of the younger generation.

Keywords: *Government Responsiveness, Juvenile Delinquency, Motorcycle Gangs, Asahan Regency*

ABSTRAK

Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan, serta mengembangkan program yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian pemerintah adalah kenakalan remaja berupa aksi geng motor yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabupaten Asahan masih menghadapi permasalahan aksi geng motor sehingga diperlukan penanganan yang responsif dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsivitas Pemerintah Kabupaten Asahan dalam penanganan kenakalan remaja aksi geng motor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Polres Asahan, Satpol PP Kabupaten Asahan, Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, DPRD Kabupaten Asahan, mantan anggota geng motor, dan orang tua mantan anggota geng motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten Asahan dalam penanganan kenakalan remaja aksi geng motor tergolong cukup responsif. Hal ini terlihat dari adanya patroli rutin, razia, sosialisasi ke sekolah, pembinaan remaja, serta koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penanganan geng motor. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Asahan juga didukung oleh Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 36 Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan penanganan kenakalan remaja dan ketertiban umum. Disarankan agar sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat terus ditingkatkan melalui koordinasi yang berkelanjutan, edukasi, serta pembinaan remaja, sehingga upaya penanganan kenakalan remaja aksi geng motor di Kabupaten Asahan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.

Kata Kunci: Responsivitas Pemerintah, Kenakalan Remaja, Geng Motor, Kabupaten Asahan